

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gerakan Sosial Politik

Menurut Kurniawan, Lutfi J. dan Hesti Puspito sari gerakan sosial adalah:

“Gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagai aksi kolektif, baik untuk mendukung dan atau menentang keberlakuan suatu nilai atau norma tertentu, maka proses bekerjanya gerakan sosial harus bertumpu kepada daya intelektualitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut” (2012:84).”

Berdasarkan kutipan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gerakan sosial berurusan dengan nilai, norma, dan budaya tertentu yang harus didukung atau ditentangnya. Di sinilah esensi gerakan sosial yang merupakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui *instrument* kelembagaan sosial baik yang berbentuk organisasi, komunitas ataupun sejenisnya. Gerakan yang dilakukan tersebut kemudian ditransformasikan menjadi sebuah gerakan bersama yang mempunyai fokus pada suatu isu atau masalah baik masalah sosial politik, lingkungan dan sebagainya. Melalui upaya gerakan bersama tersebut, ekspresi gerakannya dapat diwujudkan dalam bentuk penolakan, mendukung, ataupun mengkampanyekan sebuah perubahan sosial yang tentu saja harus disampaikan dengan pemikiran yang berintelektualitas, sehingga tujuan untuk kemaslahatan bersama yang hendak dicapai dapat terwujud secara efektif.

Prof. Jerome Davis dalam Kurniawan, Lutfi J. dan Hesti Puspito Sari (2012:115) menyatakan:

“Gerakan sosial muncul sebagai reaksi atas sekumpulan individu maupun kelompok yang tidak puas terhadap kondisi kehidupan sosial yang terjadi. Ada semacam ketamakan hidup yang bisa menyebabkan perpecahan sosial dan mental, maka gerakan sosial ini berkembang dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan”

Berdasarkan pernyataan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial dapat timbul sebagai reaksi yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun organisasi sebagai reaksi terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan pada dasarnya gerakan sosial ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pulalah yang tercermin dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah.

Pengertian gerakan sosial menurut Jary, Julia dan David Jary *Collins* dalam *Dictionary of Sociology* menyatakan “*social movement as any broad social alliance of people who are associated in seeking to effect or to block an aspect of social change within a society*” artinya, Suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. (1995: 614-615).

Berdasarkan pernyataan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu tatanan masyarakat, baik ataupun buruknya dapat terjadi karena suatu aliansi sosial yang bertindak sebagai pendorong ataupun penghambat terjadinya perubahan sosial tersebut.

1. Teori-teori Gerakan Sosial

Berikut ini beberapa teori gerakan sosial:

1) Teori tindakan/aksi kolektif

Teori tindakan kolektif banyak berkonsentrasi pada kondisi-kondisi eksternal tindakan manusia dalam konteks keseluruhan sosial, yakni pada alasan-alasan sosial aksi massa.

2) Teori Nilai Tambah

Teori ini diambil dari kajian ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Gerakan sosial sebagai nilai tambah sebagai tujuan utama yakni di bidang ekonomi.

3) Teori Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini meliputi keahlian atau pengalaman, keuangan, sumber informasi dan legitimasi, berdasarkan teori ini sebuah gerakan sosial di pengaruhi oleh keberadaan sumber daya yang ada dengan kata lain keberadaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan, kesinambungan bahkan kemunduran dan kehancuran gerakan sosial, begitu pentingnya faktor ini sehingga tanpa adanya sumber daya yang cukup atau ketidakmampuan mengelola sumber daya menjadi penyebab berhentinya sebuah gerakan.

4) Teori Proses Politik

Proses politik berperan dalam gerakan situasi sosial politik dalam masyarakat merupakan keberpihakan Negara kepada kepentingan publik, atau teralinasinya publik dari perhatian Negara.

5) Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)

Menurut Pichardo dan Singh (2001), teori gerakan sosial baru bercirikan sebagai berikut:

- a. Ideologi dan tujuan gerakan sosial baru meninggalkan orientasi ideologis yang melekat pada gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru menepis semua asumsi Marxian semua perjuangan dan pengelompokan di dasari pada konsep kelas. Gerakan sosial yang bertujuan untuk menumbangkan posisi Negara kemudian menggantikannya dengan kekuatan proletar. Namun dalam gerakan sosial baru, mereka memosisikannya sebagai partner pemerintah atau Negara untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.
- b. Taktik dan pengorganisasian, Gerakan sosial baru umumnya tidak lagi mengikuti pengorganisasian seperti serikat buruh, atau model politik kepartaian lebih memilih saluran di luar politik normal dan menerapkan taktik yang mengganggu dari mobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik serta cenderung menggunakan demonstrasi yang amat dramatis.
- c. Partisipan atau aktor, menurut Pichardo (1997) partisipan gerakan sosial baru muncul dari kalangan kelas menengah baru yang bekerja di sektor ekonomi non produktif umumnya adalah kaum terdidik.
- d. Medan atau area, merupakan lintasan batas regional, dari arah lokal sampai internasional. Strategi dan cara mobilisasi bersifat global.

2. Gerakan sosial politik

Ada beberapa pengertian gerakan sosial (politik) yang di berikan para ahli, seperti yang di jelaskan oleh Kamanto Sunarto (2004:195), bahwa yang di maksud dengan gerakan sosial politik adalah perilaku kolektif yang di tandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang yaitu untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. sedangkan ciri-ciri dari gerakan sosial (politik) adalah sebagai berikut:

1. Adanya perilaku Kolektif.
2. Adanya kepentingan bersama.
3. Mengubah serta mempertahankan masyarakat atau intuisi yang ada di dalamnya.
4. Tujuan jangka panjang.

Selain ciri-ciri, Kamanto juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab adanya sebuah gerakan (politik) yaitu:

1. Adanya faktor psikologis.
2. Faktor sosiologis
3. Defrivasasi ekonomi dan sosial seperti Bahan bakar minyak naik.
4. Defriasi relative seperti mapan ekonomi, tetapi tidak puas dengan kemacetan demokrasi.

Menurut Bruce.J.Chohen (1992:435), gerakan sosial (politik) adalah gerakan yang di lakukan sekelompok individu yang terorganisir untuk mengubah (perubahan) atau mempertahankan (konservatif) unsure tertentu dari masyarakat yang lebih luas, kemudian Bruce.J. Cohen memberikan ciri-ciri gerakan sosial (politik) sebagai berikut:

1. Gerakan yang di lakukan oleh kelompok.
2. Struktur, mekanisme kerja, jaringan yang teroganisir.
3. Memiliki rencana dan metode yang teroganisir.
4. Memiliki sebuah ideology yang menjadi pegangan dasar organisasi.
5. Mengubah atau mempertahankan sesuatu.
6. Memiliki usia jauh lebih panjang

Selain itu, ia juga menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan gerakan sosial (politik) yaitu:

1. Karena ketidakpuasan banyak orang terhadap sesuatu.
2. Frustrasi kolektif.
3. Persamaan nasib.
4. Keyakinan bahwa bila mereka bersama dan bersatu dapat mengadakan perubahan dan mengatasi persoalan bersama.

Sedangkan menurut Kartasapura dan Kreimers (1987:180), gerakan sosial (politik) adalah kegiatan atau usaha kolektif yang berusaha untuk mengadakan orde kehidupan yang baru. Untuk ciri-ciri dari gerakan sosial politik Kartasaputra memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keadaan gelisah atau kacau.
2. Mendapatkan daya gerak dari ketidakpuasan kehidupan sekarang.
3. Mendapatkan daya gerak dari keinginan mewujudkan sistem kehidupan baru.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian gerakan sosial politik tersebut, maka bisa diambil suatu pengertian umum tentang gerakan sosial politik, yaitu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki, visi, misi, tujuan, ide, nilai politik yang sama (mempertahankan, merubah, merebut, mengontrol dan menjalankan kehidupan sosial politik) yang dilakukan secara sistematis, terorganisir dan bertahan cukup lama.

Terkait dengan gerakan Muhamadiyah, bisa disimpulkan bahwa gerakan yang dilakukan Muhamadiyah adalah gerakan dari sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki tujuan mengikuti ajaran Islam dengan mencontoh nabi Muhammad SAW, tidak mencampuradukkan agama dengan adat yang berbau mistik, dan lebih modern dibanding organisasi sosial keagamaan lain.

3. Fungsi Gerakan Sosial

Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan ke dalam opini publik yang dominan seperti memberi pelajaran politik yang benar.

Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting. Gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan nasional menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin negaranya.

Fungsi-fungsi gerakan sosial sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan kedalam opini publik yang dominan.
2. Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting

4. Tipe Gerakan Sosial

Disekitar kita banyak terdapat macam-macam gerakan sosial. Seperti halnya gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, gerakan religius, gerakan sosial, gerakan radikal, gerakan ideologi, dan kalau kita menganalisis secara terperinci maka sangat banyak macam-macam gerakan sosial yang tumbuh di dalam tataran masyarakat.

Karena keragaman gerakan sosial sangat besar, maka berbagai ahli sosiologi mencoba mengklarifikasikan dengan menggunakan kriteria tertentu. David Aberle, misalnya, dengan menggunakan kriteria tipe perubahan yang dikehendaki (perubahan perorangan dan perubahan sosial) dan besar pengaruhnya yang diinginkan (perubahan untuk sebagian dan perubahan menyeluruh). Membedakan empat tipe gerakan sosial, tipologi Aberle adalah sebagai berikut:

1. *Alternative Movement*

Ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk merubah sebagian perilaku perorangan. Dalam kategori ini dapat kita masukan berbagai kampanye untuk merubah perilaku tertentu, seperti misalnya kampanye agar orang tidak minum-minuman keras. kini pun banyak dilancarkan kampanye agar dalam melakukan perbuatan seks dengan bertanggung jawab.

2. *Redemptive Movement*

Gerakan ini lebih luas dibandingkan dengan *alterative movement*, karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku perorangan. Gerakan ini kebanyakan terdapat di bidang agama. Melalui gerakan ini, misalnya, perorangan diharap untuk bertobat dan mengubah cara hidupnya sesuai dengan ajaran agama.

3. *Reformative Movement*

Gerakan ini yang hendak diubah bukan perorangan melainkan masyarakat namun lingkup yang hendak diubah hanya segi-segi tertentu masyarakat, misalnya gerakan kaum homoseks untuk memperoleh perlakuan terhadap gaya hidup mereka atau gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki. Gerakan *people power* di Filipina atau gerakan menentang pedana menteri Suchinda di Thailand pun dapat dikategorikan dalam tipe ini karena tujuannya terbatas, yaitu pergantian pemerintah.

4. *Transformative Movement*

Gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Gerakan kaum Khmer Merah untuk menciptakan masyarakat komunis di Kamboja. Suatu proses dimana seluruh penduduk kota dipindahkan ke desa dan lebih dari satu juta orang Kamboja kehilangan nyawa mereka karena di bunuh kaum Khmer Merah, menderita kelaparan atau sakit merupakan contoh ekstrim gerakan sosial semacam ini. Gerakan transformasi yang dilancarkan

oleh rezim komunis di Uni Soviet pada tahun 30-an serta di Tiongkok sejak akhir 40-an untuk mengubah masyarakat mereka menjadi masyarakat komunis pun mengakibatkan menentang diskriminasi oleh orang kasta-kasta bawah, menengah dan atas. Hal itu dapat di kategorikan kedalam gerakan ini karena keberhasilan gerakan mereka akan berarti pula perombakan mendasar pada masyarakat India. (Light, Keller dan Craig Calhoun, 1989:599-600).

5. Strategi Gerakan Sosial

Para akademisi menyebut pentingnya proses *framing* dalam memahami sukses tidaknya sebuah gerakan sosial. Menurut Snow dan Banford, suksesnya gerakan sosial terletak pada sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembuatan *framing* masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Cara ini merupakan upaya meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka terdorong mendesakkan sebuah perubahan. Komponen utama dari proses *framing* gerakan adalah diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya serta memprediksi elemen sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut. Snow menambahkan bahwa proses *framing* membuat orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berpikir dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah-masalah di

dunia. Skema ini bisa menyalahkan atau menyarankan garis aksi (Snow dan Banford, 1988 dalam Situmorang, 2007).

Untuk mencapai sebuah kelompok sasaran, aktor gerakan membutuhkan alat dalam menjalankan *framing*, yaitu media. Zald berpendapat bahwa pengkontesan *framing* terjadi dalam interaksi berhadapan-hadapan dan melalui beragam media cetak dan elektronik (Zald, 1996 dalam Situmorang, 2007).

Indikasi awal untuk menangkap gejala gerakan sosial menurut John Lofland (Protes; Insist Press 2003 dalam Iswinarto, 2008) adalah dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena publik dan ditandai oleh kualitas “aliran” atau “gelombang”. Dalam prakteknya suatu gerakan sosial dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, bertambahnya jumlah anggota pada suatu organisasi gerakan dan semakin banyaknya aksi kekerasan atau protes terencana dan tak terencana.

Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan adalah, pertama, aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati kurun waktu itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah mengalami proses *'cooled down'*. Kedua, banyak organisasi kekerasan atau protes yang berubah menjadi gerakan sosial atau setidaknya bagian dari gerakan-gerakan yang disebut diatas. Organisasi-organisasi ini selalu berupaya menciptakan gerakan sosial atau jika organisasinya memiliki

teori operasi yang berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu pergeseran struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis kapitalisme) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dan jahat, atau kedua hal tersebut, serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral. Kala itulah gerakan itu bisa dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan.

Lebih lanjut dapat dirumuskan bahwa sebuah gerakan sosial terdiri dari:

1. Lahirnya kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang dibentuk secara *independent*
2. Bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes terencana dan tak terencana (terutama kumpulan) secara cepat.
3. Kebangkitan opini massa
4. Semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral
5. Sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur dari lembaga-lembaga sentral.

Selain itu 5 gejala gerakan sosial seperti disebutkan oleh Lofland, pemahaman tentang gerakan sosial dapat diturunkan lebih jauh ke dalam enam pertanyaan pokok tentang Gerakan Sosial. Ke 6 pertanyaan pokok merupakan indikator yang praktis untuk menganalisis gerakan sosial sekaligus sebagai petunjuk praktis bagi pelaku gerakan sosial untuk ‘merancang’ atau paling tidak memicu gerakan sosial

1. Kepercayaan: hal-hal yang dianggap benar (ideologi, doktrin, pandangan, harapan, kerangka berpikir, wawasan, perspektif.) realitas apa yang mereka tuntut/pertentangkan siapa yang dianggap lawan dan siapa yang diteladani perubahan secara total atau parsial pada tingkatan individual.

2. Organisasi: cara bagaimana orang-orang yang mempunyai 'pandangan' yang sama, diatur/diarahkan untuk mencapai tujuan. bagaimana orang-orang diorganisir/cara-cara mengorganisir- bagaimana proses pengambilan keputusan adakah pembagian kerja di organisasi gerakan cara memelihara orang-orang tetap melaksanakan tugasnya cara-cara memperoleh dana dari gerakan organisasi bersifat sementara atau permanent.
3. Sebab-sebab: variabel-variabel yang berpengaruh terhadap gerakan sosial bagaimana gerakan sosial dimulai/dibentuk, kapan gerakan itu dibentuk mengapa gerakan itu muncul Secara teoritik ada 16 variabel yang berpengaruh, yaitu:
 1. perubahan dan ketimpangan sosial
 2. kesempatan politik
 3. Campur tangan negara terhadap kehidupan warga
 4. kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
 5. konsentrasi geografis
 6. identitas kolektif
 7. solidaritas antar kelompok
 8. krisis kekuasaan
 9. melemahnya kontrol kelompok yang dominan
 10. pemfokusan krisis
 11. sinergi gelombang warga negara (penduduk)
 12. adanya pemimpin
 13. jaringan komunikasi

14. integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial
 15. adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
 16. kemampuan mempersatukan
4. Keikutsertaan : keanggotaan dalam arti yang paling lemah sampai yang paling kuat
 - mengapa orang ikut dalam gerakan
 - sampai seberapa jauh keterlibatannya dalam organisasi
 - siapa yang menjadi pendukung gerakan
 5. Strategi : cara atau metode untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan apa ada tujuan utama dari setiap strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan itu, akan lebih menekankan yaitu pada perubahan institusi-institusi sosial (*societal manipulation*) ataukah dengan mengubah hati dan pemikiran orang-orang (*personal transformation*) strategi yang digunakan bersifat terbuka atau tertutup, terang-terangan atau tersembunyi menggunakan strategi penyerangan frontal atau pengikisan ‘pendirian’ mereka dinyatakan secara halus (*polite*), melalui aksi protes atau kekerasan mekanisme taktik yang digunakan terhadap kelompok sasaran : persuasi, negosiasi atau paksaan.
 6. Efek : tanggapan atau reaksi kalangan luar terhadap gerakan sosial
 - Reaksi penguasa
 - Reaksi elit
 - Reaksi media
 - Reaksi sesama gerakan sosial

6. Penguatan Masyarakat Sipil

Penguatan masyarakat sipil secara umum adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, marjinal, terbelakang dan tertindas dari pihak yang kuat atau berkuasa agar masyarakat sipil bisa hidup mandiri dan memiliki status posisi tawar yang kuat dengan pihak lain. Sedangkan menurut organisasi Muhammadiyah biasa disebut dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat melalui beberapa jalur yaitu jalur pendidikan dan non pendidikan.

Istilah *civil society* berasal dari bahasa Latin *societes civiles* yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator, politisi dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian *civil society* masih disamakan dengan negara (*the state*), yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain.

Dalam rentang waktu yang panjang itu, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) kembali menghidupkan dan mengembangkan istilah *civil society* (masyarakat sipil) dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. Hobbes, misalnya, berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*) yang mana dihadapkan dengan keadaan alami (*state of nature*) sekelompok manusia. Masyarakat politik itu sendiri, menurut Rousseau

yang senada dengan Hobbes, merupakan hasil dari suatu kontrak sosial. Perlu digarisbawahi bahwa pengertian-pengertian ini lahir ketika perbedaan antara masyarakat sipil dan negara belum dikenal, sehingga negara merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mengontrol pola-pola interaksi warga negaranya.

Barulah pada paruh kedua abad 18 Adam Ferguson (1723-1816) dan Thomas Paine (1737-1809) memberi tekanan lain terhadap makna *civil society*. *Civil society* dan negara dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan (*enlightment*). Keduanya diposisikan dalam posisi yang diametral. Masyarakat sipil bahkan dinilai sebagai anti tesis terhadap negara, ia harus lebih kuat untuk mengontrol negara demi kepentingannya.

Pemahaman ini mengundang reaksi para pemikir lainnya seperti Hegel (1770-1831) yang beraliran idealis. Menurutnya *civil society* tidak dapat dibiarkan tanpa terkontrol. Ia justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik. Lebih lanjut, Hegel membedakan masyarakat politik (*the state*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat politik adalah perkumpulan-perkumpulan yang mengandung aspek politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat sipil ialah perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat borjuis.

Karl Marx (1818-1883) sependapat dengan Hegel dalam melihat *civil society* sebagai masyarakat borjuis. Bedanya, Hegel menganggap hanya melalui negara, kepentingan-kepentingan masyarakat yang universal dan mengandung potensi konflik bisa terselesaikan. Dus, negara merupakan sesuatu yang ideal. Marx berpandangan sebaliknya, ia menganggap negara tak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Oleh sebab itu, negara harus dihapuskan, atau harus diruntuhkan oleh kelas proletar. Ketika negara akhirnya lenyap, maka yang tinggal hanyalah masyarakat tanpa kelas. Visi ini berseberangan dengan visi Hegel yang mengatakan di masa depan masyarakat sipillah yang akan runtuh dari dalam, jika negara telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Antonio Gramsci (1891-1937) yang juga memandang *civil society* sebagai milik kaum borjuis yang akhirnya menjadi pendukung negara, disamping mereka memegang hegemoni, mereka juga seharusnya bisa menjalankan fungsi etis dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan ekonomi masyarakat. (Dawam Raharjo: 1999)

Adapun menurut Alexis de Tocqueville (1805-1859), masyarakat sipil tidak secara *a priori* subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik. Pendapat Tocqueville ini kemudian diperkuat oleh Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929-) dengan konsep "*a free public sphere*", sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga

negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Penciptaan ruang publik, bagi Arendt merupakan prasyarat terciptanya *civil society* dan demokratisasi. Hal senada diungkapkan Ernest Gellner (1925-1995) yang memandang perlunya ruang dan kebebasan publik. Menurutnya *civil society* adalah seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan.

Secara umum saat ini, penganut sosialis banyak mengadopsi konsep hegemoni Gramsci dalam memahami *civil society* dimana hegemoni tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penjinakan budaya dan ideologi yang diselenggarakan secara terstruktur oleh negara. Sementara penganut kapitalis lebih tertarik kepada *civil society* versi Tocqueville dimana masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Adapun di negara-negara berkembang umumnya, sikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan yang dominan. Di satu sisi mereka memandang negara sebagai wadah segala sesuatu yang ideal dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil.

Muhammad A.S. Hikam (1996) menyatakan bahwa:

“Masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai tiga ciri khusus yaitu: *pertama*, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. *Ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis dan otoriter. Selanjutnya masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain

kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Sebagai sebuah ruang publik, masyarakat sipil adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap oleh jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*free public sphere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat”.

Makna *Civil Society* “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari *civil society*. Konsep *civil society* lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata “*societies civilis*” dalam filsafat politiknya. Konsep *civil society* pertama kali dipahami sebagai negara (*state*). Secara historis, istilah *civil society* berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes.

Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan *monarchi-absolut* dan ortodoks gereja (Larry Diamond, 2003: 278).

Berbeda dari pandangan Hegelian, pemikiran Tocqueville lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak apriori maupun tersubordinasi dari lembaga negara. Sebaiknya, *civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara. Lebih lanjut Tocqueville menegaskan, bahwa karakter *civil society* seperti

itu dapat pula menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara dan pada saat bersamaan ia pun bisa menjadi kekuatan kritis (*reflective-force*) untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat dari proses modernisasi. Dapatlah disimpulkan, pandangan *civil society* ala Tocqueville ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik.

Konsepsi *civil society* ala Tocqueville ini dipadukan pula oleh (Rahardjo 1999) dengan pandangan Hannah Arendt dan Juergen Habermas tentang ruang publik yang bebas (*free public sphere*). Menurut keduanya, dengan adanya ruang publik yang bebas, maka setiap individu warga negara dapat dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Lebih lanjut (Rahardjo 1999) menyatakan, institusionalisasi dari ruang publik ini adalah melalui kemunculan lembaga-lembaga sosial yang bersifat sukarela (*volunteers*), media massa, sekolah, partai politik, sampai pada lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi berfungsi sebagai lembaga pelayanan masyarakat.

Selain kedua model di atas, pola hubungan kerja antara negara (pemerintahan), masyarakat madani (*civil society*), dan swasta (pasar) berada dalam kerangka keseimbangan peran masing-masing. Dengan pola hubungan kerja tersebut, Menurut (Ubaedillah *et al.* 2009) rakyat bisa

mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.

Seperti dikatakan di muka bahwa tata pemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

B. Masyarakat Sipil

Civil Society juga dapat dipahami dengan arti masyarakat madani masyarakat madani adalah masyarakat sipil masyarakat yang tanggap, dan juga beradab dan tentunya masyarakat yang memiliki budaya dan dapat menjaga budaya aslinya meskipun terjadi pertukaran budaya yang besar – besaran saat ini. Masyarakat madani adalah suatu konsep yang diambil oleh Indonesia dari Kota Madinah, dimana Kota Madinah ini telah mempunyai peradaban yang sudah sangat lama dan baik dibawah

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang hingga saat ini masih dinilai sebagai peradaban tertinggi. Dahulunya Madinah tersebut bernama asli Yasrib yang berada di wilayah Arab. Madani tersebut berarti Kota (*city state*) sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan Polis yang artinya juga sama yaitu kota. *Civil Society* merupakan satu cara untuk memahami relasi antara individu dan negara yang melestarikan kebebasan dan tanggung jawab.

Pengertian *Civil Society* menurut Jean L. Kohen dan Andrew Arato (1992) adalah *Modern Civil Society is based on egalitarian principle and universal inclusion experience in articulating the political will and in collective decision making is crucial to the reproduction of democracy*. *Civil Society* yang dimaksudkan adalah suatu masyarakat sipil yang didasari oleh kesetaraan dan selain itu juga masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan umum serta masyarakat yang didasari oleh demokrasi sehingga dapat membentuk masyarakat yang mandiri.

Civil Society, dua kata tersebut kurang populer di ruang lingkup masyarakat Indonesia jika diubah ke Bahasa Indonesia artinya adalah masyarakat sipil. Kebanyakan masyarakat pada umumnya mengertakaitkan antara kata sipil dengan militer oleh karena itu kata tersebut masih terasa asing di lingkungan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masyarakat madani, meski tidak semua memahami apa arti masyarakat madani tersebut namun sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun sebenarnya memang tidak ada perbedaan antara Masyarakat madani,

Civil Society dan masyarakat sipil tersebut. Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang tegak diatas prinsip – prinsip egaliterisme-sederajat dan inklusivisme universal. Secara konkret, masyarakat sipil bisa terwujud sebagai organisasi yang berada di luar institusi pemerintah yang mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan *counter* hegemoni yang sudah pasti dapat mempengaruhi kebijakan umum.

C. Relasi Masyarakat Dengan Negara

Idi, Jahidi dalam *Peranan Masyarakat Sipil Menuju Sistem Pemerintahan Negara Yang Demokratis* (2004) menyatakan bahwa:

Dalam hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* memiliki tiga fungsi, yaitu

1. Fungsi Komplementer

komplementer di mana elemen-elemen *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik (*public services*).

2. Fungsi Substitusi / Subtitutor

kalangan *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas.

3. Fungsi Kekuatan Tandingan

sebagai kekuatan tandingan negara atau *counterbalancing the state* atau *counterveiling forces*. Kalangan *civil society* melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar aparatur birokrasi negara.

D. Kerangka Pikir

Sebagai sebuah agama, Islam juga di pandang pengikutnya sebagai sebuah ideologi yang mereka percaya Islam tidak hanya mengatur masalah ruhaniah semata atau hubungan manusia dengan Tuhannya melainkan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam lingkup sosial, ekonomi, politik, budaya yang sering di sebut sebagai hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minannas*). Dengan di jadikanya Islam sebagai sebuah ideologi tidak heran di kalangan penganutnya timbul berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh pemikir Islam tentang konsep yang diaktualisasikan ke dalam sebuah gerakan Islam.

Banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang ada sekarang ini mulai dari gerakan Islam tradisional, gerakan Islam liberal sampai kepada gerakan Islam modern. Gerakan – gerakan tersebut timbul selain karena ingin menyampaikan aspirasinya tentang masalah-masalah sosial yang terjadi dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, juga mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan sosial yang memberikan dampak yang positif

tentunya bagi kemaslahatan bersama terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, ataupun kekurangan dan kelebihan. dari beragam gerakan Islam tersebut, Penulis mencoba meneliti mengenai posisi dan peran organisasi Muhammadiyah yang diaktualisasikan melalui gerakan sosial yang berbasiskan Agama Islam yang dasar pemikirannya tentu saja bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah.

Gambar 1. Kerangka Pikir

